



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. HERI IBNU WIBOWO
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 400619

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.180.900.000

1. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 306.000.000
2. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1210 m2/500 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 2.783.000.000
4. Tanah Seluas 3840 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 422.400.000
5. Tanah Seluas 2380 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 238.000.000
6. Tanah Seluas 3315 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 331.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 666.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.082.095.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.928.995.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.928.995.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.